

## RINGKASAN

**ARY EKO NUGROHO.** Pengaruh Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pengawas Perikanan, Dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Terhadap Praktek *IUU Fishing* di Wilayah Perairan Brondong, Lamongan (dibawah bimbingan **Dr. Ir. Darmawan Ockto S, MS** dan **Dr. Ir. Sukandar, MP**).

---

Pada tahun 2005 dibentuklah Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DPSDKP) yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan fungsinya tersebut PSDKP telah mengembangkan konsep pengawasan yang dikenal dengan system *Monitoring, Controlling, and Surveillance* (MCS) yang diharapkan dapat menekan dan memperkecil jumlah pelanggaran yang terjadi di wilayah laut Indonesia. Pada tahun 2007 Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) membentuk Satuan Kerja, Dalam menjalankan tugasnya, Satker Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melibatkan masyarakat pesisir dengan membentuk kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi *IUU fishing*, pengaruh kinerja PPNS, Pengawas perikanan, dan Pokmaswas terhadap praktek *IUU fishing* serta mengetahui kendala yang dihadapi Satker PSDKP Brondong dalam upaya menanggulangi praktek *IUU fishing* di wilayah perairan Brondong, Lamongan.

Penelitian ini dilaksanakan di Satker PSDKP Brondong, Lamongan. Penelitian yang meliputi penyusunan proposal, pengumpulan data, dan penyusunan laporan telah dilaksanakan mulai bulan februari 2013 – Mei 2015 dengan menggunakan pendekatan penelitian dengan menggunakan metode analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda. Responden yang dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini berjumlah 10 pegawai Satker PSDKP dan 14

orang anggota POKMASWAS . Sumber data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan kuesioner.

Pelanggaran yang terjadi di Perairan Brondong Lamongan lebih mengarah pada pelanggaran administratif berupa tidak adanya dokumen, dokumen tidak lengkap, dan juga penggunaan alat tangkap mini trawl yang mana merupakan salah satu bentuk *illegal fishing*, dikarenakan *mini trawl* merupakan alat tangkap yang tidak diperbolehkan untuk dioperasikan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan antara lain: keterbatasan jumlah Pengawas Perikanan dan tenaga fungsional, kurangnya sarana dan prasarana, masih banyaknya kapal yang ijinnya tidak sesuai, adanya insiden penolakan masuknya kapal dari luar daerah.

Kinerja PPNS ( $X_1$ ), Kinerja Pengawas Perikanan ( $X_2$ ), dan Kinerja POKMASWAS ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yaitu Praktek *IUU Fishing* di Perairan Brondong Lamongan dengan kata lain model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel kinerja PPNS, Pengawas Perikanan, dan POKMASWAS terhadap tingkat praktek *IUU fishing* di Perairan Brondong Lamongan.